ABSTRAK

MIRNA ANGGRAINI, NPM. 20,22.081 "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA NO 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARAL". Dibimbing oleh **Bapak Drs. H. Arpandi, M.A.P.** sebagai pembimbing I dan **Bapak Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos. M.A.P** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa pada Pasar Induk Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara permasalahan mengenai kurangnya pengawasan dari Dinas Perindistribusian Pedagang Koperasi Dan UKM terhadap belum optimalnya sosialisasi pemerintah terhadap pedagang mengenai pasar induk amuntai, sarana dan prasarana yang belum optimal beberapa pembangunan yang masih kurang di perhatikan terdapat sejumlah toko yang mengakami kerusakan cukup parah penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang belum berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini Untuk mengatahui, sejauh mana pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 pada pasar induk amuntai kabupaten hulu sungai utara dan faktor - faktor yang mempengearuhinya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif. Dengan Teori George C. Edward, Abdal (2025: 148 – 149), Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sehingga terdapat informan berjumlah 15 orang dan analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menujukan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Pada Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup optimal. Dilihat dari beberapa indikator yakni : Pertama, tranmisi kurang optimal. kedua, kejelasan kurang optimal. Ketiga, konsistensi kurang optimal. Keempat, staf kurang optimal. Kelima, informasi cukup optimal. Keenam, wewenang cukup optimal. Ketujuh fasilitas kurang optimal. Kedelapan, pengangkatan birokrasi sudah optimal. Kesembilan, insentif sudah optimal. Kesepuluh, standar operating prosedures (SOP) cukup optimal. Kesebelas, fragmentasi cukup optimal. Disamping itu faktor penghambat yaitu terbatasnya dana anggaran yang menghambat dalam pembehan sarana dan prasarana, tim pelaksana belum sepenuhnya menjalankan SOP, kurangnya kejelasan penyampaian informasi. Adapun faktor pendukung yaitu koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik, adanya komunikasi di lapangan.

Oleh karena itu disarankan Kepada Kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UKM Kecematan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara hendaknya mengawasi langsung pada saat melakukan sosialisasi masalah peraturan daerah nomor 17 tahun 2013 kepada pedagang atau masyarakat, agar dapat meanggarkan anggaran untuk fasilitas yanag ada di pasar induk amuntai, Kepada Kepala UPT Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara hendaknya lebih sering melakukan sosialisasi dan segera menyusun jadwal khusu kepada pedagang maupun masyarakat, Petugas keamanan Pasar Induk Amuntai agar memperoleh pelatihan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan pasar serta mendapatkan buku pedoman SOP sebagai acuan dalam menjalankan tugas.

ABSTRACT

MIRNA ANGGRAINI, Student Identification Number (NPM) 20.22.081. Implementation of Hulu Sungai Utara Regency Regional Regulation Number 17 of 2013 at Amuntai Central Market, Hulu Sungai Utara Regency. Supervised by Drs. H. Arpandi, M.A.P. as Supervisor I and **Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos., M.A.P.** as Supervisor II.

This research was motivated by the suboptimal implementation of Hulu Sungai Utara Regency Regional Regulation Number 17 of 2013 at Amuntai Central Market, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency. The problems identified include inadequate supervision by the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises (SMEs), insufficient government socialization of the regulation to traders, ineffective market supervision resulting in potential disturbances to market order and the environment, inadequate facilities and infrastructure, severe damage to several market shops, and the less-than-optimal implementation of Standard Operating Procedures (SOPs). This study aims to determine the extent of the implementation of Regional Regulation Number 17 of 2013 at Amuntai Central Market, Hulu Sungai Utara Regency, and to identify the factors influencing its implementation. This study employed a descriptive qualitative research method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Informants were selected using a purposive sampling technique, resulting in a total of 15 informants. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the implementation of Hulu Sungai Utara Regency Regional Regulation Number 17 of 2013 at Amuntai Central Market can be categorized as fairly good. Based on the research findings, the implementation was assessed through several indicators: (1) transmission was less than optimal; (2) clarity was less than optimal; (3) consistency was less than optimal; (4) staff performance was fairly good; (5) information dissemination was less than optimal; (6) authority was fairly adequate; (7) facilities were inadequate; (8) bureaucratic staffing had been implemented optimally; (9) incentives had been implemented optimally; (10) the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs) was fairly optimal; and (11) fragmentation was fairly optimal.

The inhibiting factors included limited budget allocations affecting the provision of facilities and infrastructure, uneven availability of facilities and infrastructure throughout the market, and inadequate clarity in information dissemination to traders.

Based on the findings, it is recommended that the Head of the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises of Hulu Sungai Utara Regency strengthen direct supervision during the dissemination of Regional Regulation Number 17 of 2013 to traders and the public, as well as allocate sufficient funds to improve the facilities at Amuntai Central Market. Furthermore, the Head of the Market Technical Implementation Unit (UPT Pasar) is expected to conduct more intensive socialization activities by preparing a structured schedule for traders and the community. Market security officers should also receive training on Standard Operating Procedures (SOPs) for market security and be provided with SOP manuals as guidelines in performing their duties.